



LAPORAN KEUANGAN AUDITED

TAHUN ANGGARAN 2025

KANTOR UPBU KELAS I MOPAH

JL. PGT
KABUPATEN MERAUKE- PAPUA SELATAN

BAGIAN ANGGARAN 022



LAPORAN KEUANGAN KANTOR UPBU MOPAH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PERIODE AUDITED

TAHUN ANGGARAN 2025

**JL. PGT
KABUPATEN MERAUKE
PROPINSI PAPUA SELATAN**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah Merauke adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah Merauke. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Merauke, 05 Mei 2026
Plt. Kepala Kantor UPBU
Mopah Merauke




BLASIUS BASA S.Sos, M.M
NIP. 19740102 200003 1 001

	Hal
Kata Pengantar	1
Pernyataan Tanggung Jawab	4
I. Ringkasan	5
II. Laporan Realisasi Anggaran	8
III. Neraca	9
IV. Laporan Operasional	10
V. Laporan Perubahan Ekuitas	11
VI. Catatan Atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
A.1. Dasar Hukum	12
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis	12
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	13
A.4. Kebijakan Akuntansi	13
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	21
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	21
B.2. Belanja Negara	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
C.1. Aset Lancar	25
C.2. Aset Tetap	26
C.3. Kewajiban Jangka Pendek	30
C.4. Ekuitas	32
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	33
D.1. Pendapatan Operasional	33
D.2. Beban Operasional	33
D.3. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	38
D.4. Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	38
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	39
E.1. Surplus/Defisit Pos LO	39
E.2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	40
E.3. Transaksi Entitas dan Ekuitas Akhir	40
F. Pengungkapan Penting Lainnya	42
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	42
F.2. Pengungkapan Lain-lain	42

Tabel 1	: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2025 dan 2024	5
Tabel 2	: Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2025 dan 2024	6
Tabel 3	: Penggolongan Kualitas Piutang	19
Tabel 4	: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	20
Tabel 5	: Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	21
Tabel 6	: Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2025 dan 2024	21
Tabel 7	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025 dan 2024	22
Tabel 8	: Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025 dan 2024	23
Tabel 9	: Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024	23
Tabel 10	: Perbandingan Belanja Barang Per Per 31 Desember 2025 dan 2024	24
Tabel 11	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 2024	24
Tabel 12	: Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024	25
Tabel 13	: Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	25
Tabel 14	: Rincian Persediaan	26
Tabel 15	: Rincian Aset Tetap	26
Tabel 16	: Rincian Saldo Tanah	27
Tabel 17	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	29
Tabel 18	: Rincian Kewajiban Jangka Pendek	30
Tabel 19	: Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	31
Tabel 20	: Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan	31
Tabel 21	: Rincian Pendapatan Diterima di Muka	32
Tabel 22	: Rincian Ekuitas Dana Lancar	32
Tabel 23	: Rincian PNBP-LO	33
Tabel 24	: Rincian Beban Pegawai	33
Tabel 25	: Rincian Beban Persediaan	34
Tabel 26	: Rincian Beban Barang dan Jasa	34
Tabel 27	: Rincian Beban Pemeliharaan	35
Tabel 28	: Rincian Beban Perjalanan dinas	35
Tabel 29	: Rincian Beban Barang Untuk diserahkan kepada Masyarakat	36
Tabel 30	: Rincian Beban Bantuan Sosial	36
Tabel 31	: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	37
Tabel 32	: Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	37
Tabel 33	: Rincian Beban Lain-lain	37
Tabel 34	: Rincian Surplus/Deficit dari Kegiatan Non Operasional	38
Tabel 35	: Rincian Pos Luar Biasa	38
Tabel 36	: Rincian Koreksi Nilai Persediaan	39
Tabel 37	: Rincian Koreksi Atas Beban	40
Tabel 38	: Rincian Koreksi Atas Pendapatan	41



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
MOPAH MERAUKE**

Jln. PGT Merauke
Kode Pos : 99611

Phone : (0971) 333670

E-mail : mopahkeu@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah Merauke yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Auditet Periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Merauke, 05 Mei 2025

Kepala Kantor UPBU Mopah
Merauke



Blasius Basa, S.Sos.,MM.

NIP. 19740102 200003 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah Periode Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan belanja selama periode 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 10.310.405.396,- adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 10.310.405.396,- atau mencapai 116,49 % dari estimasi pendapatan LRA sebesar Rp. 8.850.992.000,-

Realisasi Belanja Negara sampai dengan adalah sebesar Rp. 49.689.664.323,- atau mencapai 55,36 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 8.850.992.000,-

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember Tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 30 September Tahun 2025 dan 30 September 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025			31 Desember 2024
	Anggaran	Realisasi	% Real. Thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	8.850.992.000,-	10.310.405.396,-	116,49	9.559.830.930,-
Belanja Negara	94.639.102.000,-	85.118.005.805,-	89,94	117.781.542.766,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2025

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember Tahun 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 286.801.118.894,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 611.420.942,- Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 278.984.611.896,- Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0 (Nol) dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 7.205.086.056,-

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 4.228.766.057,- yang terdiri dari Utang kepada pihak ketiga sebesar Rp. 4.228.766.057,- , Utang yang belum ditagihkan sebesar Rp. 0 (Nol),- Uang Muka dari KPPN sebesar Rp. 0 (Nol),- dan nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp. 282.575.352.837,-

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan Desember 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp.	%
ASET				
Aset Lancar	611.420.942	422.131.986	189.288.956	44,84
Aset Tetap	278.984.611.896	326.687.891.176	(47.703.279.280)	(14,60)
Piutang Jangka Panjang	-	-	-	-
Aset Lainnya	7.205.086.056	7.955.541.257	(750.455.201.)	(9,43)
Jumlah Aset	286.801.118.894	335.065.564.419	(48.264.445.525)	(14,40)
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek	4.228.766.057	1.790.500.183	2.438.265.874	136,18
Jumlah Kewajiban	4.228.766.057	1.790.500.183	2.438.265.874)	136,18
Ekuitas				
Ekuitas	282.572.352.837	333.275.064.236	(50.702.711.399)	(15,21)
Jumlah Ekuitas	282.572.352.837	333.275.064.236	(50.702.711.399)	(15,21)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	286.801.118.894	335.065.564.419	(48.264.445.525)	(14,40)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit pos luar biasa, dan surplus/defisit LO.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 8.952.821.273,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 134.555.760.079,- sehingga terdapat Surplus/Defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp. (125.602.938.806),- Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp. 7.560.198,- Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp.(125.595.378.068),- sehingga Surplus/Defisit-LO sebesar Rp.(125.595.378.068),-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal adalah sebesar Rp. 333.275.064.236,- Surplus/Deficit-LO sebesar Rp.(125.595.378.068,-) Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas Rp. 85.066.800,- Lain –lain sebesar Rp. 84.466.800,- Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 74.807.600.409 dan terdapat Kenaikan/Penurunan Ekuitas sebesar Rp. (50.702.711.399),- sehingga Ekuitas Akhir per tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp. 282.572.352.837,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal

31 Desember 2025, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan akuntansi berbasis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Sedangkan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan akuntansi berbasis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA MOPAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 September 2025 dan 30 September 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025		% thd Anng	31 Desember 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1.				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	8.850.992.000	10.310.405.396	116,49	9.559.830.930
Jum Pendpt Negara & Hibah		8.850.992.000	10.310.405.396	116,49	9.559.830.930
B. Belanja Negara	B.2.				
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	23.979.974.000	22.682.252.850	94,59	15.403.287.768
2. Belanja Barang	B.2.2.	62.459.128.000	54.841.147.085	87,80	60.330.925.500
3. Belanja Modal	B.2.3.	8.200.000.000	7.594.805.870	92,62	42.047.329.498
4. Belanja Sosial	B.2.4.	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja Negara		94.639.102.000	85.118.205.805	89,94	117.781.542.766

II. NERACA

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA MOPAH NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam Rp)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2025	Tahun 2024
A SET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.3	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	85.112.213	276.273.763
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.5	-5.102.301	-115.579.997
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.1.6	80.009.912	160.693.766
Persediaan	C.1.11	531.411.030	261.438.220
Jumlah Aset Lancar		611.420.942	422.131.986
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2.1	20.913.289.000	20.912.689.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	174.410.236.603	178.561.854.103
Gedung dan Bangunan	C.2.3	255.132.137.754	251.633.138.384
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	740.294.154.640	740.294.154.640
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.5	0	0
Akumulasi Penyusutan	C.2.6	-911.765.206.101	-864.713.944.951
Jumlah Aset Tetap		278.984.611.896	326.687.891.176
Piutang Jangka Panjang	C.3		
TPA	C.3.1	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA	C.3.2	0	0
TP/TGR	C.3.3	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	C.3.4	0	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		0	0
Aset Lainnya	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	18.735.338	18.735.338
Aset Lain-Lain	C.4.2	41.642.843.000	41.642.843.000
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.4.3	4.228.766.057	2.980.341.258
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	C.4.4	-38.685.258.339	-36.686.378.339
Jumlah Aset Lainnya		7.205.086.056	7.955.541.257
JUM LAH ASET		286.801.118.894	335.065.564.419
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5.1	4.228.776.057	1.790.500.183
Uang Muka dari KPPN	C.5.2	0	0
Utang yang belum ditagihkan	C.5.3	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.4	0	0
JUM LAH KEWAJIBAN		4.228.776.057	1.790.500.183
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar	C.6		
Cadangan Piutang	C.6.1	0	
Cadangan Persediaan	C.6.2	0	
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	C.6.3	0	
Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	C.6.4	0	
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	C.6.5	0	
JUM LAH EKUITAS DANA		0	0
Ekuitas Dana Investasi	C.7		
Ekuitas	C.7.1	282.572.352.837	333.275.064.236
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.7.2	0	0
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.7.3	0	0
JUM LAH EKUITAS		282.572.352.837	333.275.064.236
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		286.801.128.894	335.065.564.419

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA MOPAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PNBP Lainnya	8.952.821.273	8.806.458.582	146.362.691	1,66
Pendapatan BLU	-	-	-	0,00
Pendapatan Hibah	-	-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Operasional	8.952.821.273	8.806.458.582	146.362.691	1,66
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	22.682.252.850	15.403.287.768	7.278.965.082	47,26
Beban Persediaan	1.112.082.040	1.081.802.686	30.279.354	2,80
Beban Barang dan Jasa	44.717.252.435	51.663.090.784	(6.945.838.349)	(13,44)
Beban Pemeliharaan	8.485.043.600	6.548.521.730	1.936.521.870	29,57
Beban Perjalanan Dinas	256.796.200	1.544.741.742	(1.287.945.542)	(83,38)
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-	0,00
Beban Bunga	-	-	-	0,00
Beban Subsidi	-	-	-	0,00
Beban Hibah	-	-	-	0,00
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	57.297.365.150	84.605.893.347	(27.308.528.197)	(32,28)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	4.967.804	113.488.975	(108.521.171)	(95,62)
Beban Transfer	-	-	-	0,00
Beban Lain-lain	-	-	-	0,00
Jumlah Beban Operasional	134.555.760.079	160.960.827.032	(26.405.066.953)	(16,40)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(125.602.938.806)	(152.154.368.450)	26.551.429.644	(17,45)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	0,00
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban	-	-	-	0,00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7.560.198	471.198.542	(463.638.344)	(98,40)
Pendapatan dari Kegiatan Non	7.560.198	471.198.542	(463.638.344)	(98,40)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	0,00
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	7.560.198	471.198.542	(463.638.344)	(98,40)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(125.595.378.608)	(151.683.169.908)	26.087.791.300	(17,20)
POS LUAR BIASA	-	-	-	0,00
Beban Luar Biasa	-	-	-	0,00
POS LUAR BIASA				0,00
SURPLUS/DEFISIT – LO	(125.595.378.608)	(151.683.169.908)	26.087.791.300	(17,20)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA MOPAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 30 September 2025 dan 30 September 2024

(dalam Rp)

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	(%)
EKUITAS AWAL	333.275.064.236	376.899.940.852	(43.624.876.616)	-11,57
SURPLUS/DEFISIT – LO	(86.246.247.361)	(88.671.438.493)	2.425.191.132	-2,74
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI	84.063.312	(108.398.505)	192.461.817	-177,55
EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI	-	-	-	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN	-	-	-	0
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	-	-	-	0
Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-	0
Koreksi Nilai Persediaan	-	-	-	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	-	-	-	0
Selisih Revaluasi Aset	-	-	-	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	-	-	-	0
LAIN-LAIN	8.403.312	(108.398.505)	192.461.817	-177,55
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	42.155.720.311	81.444.463.299	(39.288.742.988)	-48,24
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(44.006.463.738)	(7.335.373.699)	(36.671.090.039)	499,92
EKUITAS AKHIR	289.268.600.498	369.564.567.153	(80.295.966.655)	-21,73

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA MOPAH

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan PMK 2005/PMK.011/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah berkomitmen dengan visi “ **mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui pembinaan akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.**”

Untuk mewujudkan visi tersebut Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian negara/Lembaga
- Membina secara efektif Kementerian negara/Lembaga dalam pemanfaatan

informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.

- Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Aplikasi SAKTI merupakan aplikasi berbasis website, aplikasi ini menggantikan SIABA dan SIMAK-BMN yang bersifat *offline* dan *stand alone* yang membutuhkan proses upload dan update versi yang berpotensi menimbulkan *error* dan ketergantungan data.

Aplikasi MonSAKTI merupakan pengganti aplikasi e-Rekon yang dahulu dipakai untuk proses rekonsiliasi elektronik. Namun demikian prosesnya masih bergantung pada data *offline* yang diunggah (belum otomatis). Aplikasi MonSakti dibuat untuk menggantikan e-Rekon dengan proses *upload* data secara otomatis dari aplikasi SAKTI. MonSAKTI tetap sama dirancang untuk menghasilkan LK Satuan Kerja yang terdiri dari LRA, Neraca, LO, dan LPE, asset tetap, persediaan, dan asset lainnya untuk penyusunan neraca dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) serta laporan manajerial lainnya.

A.4 Basis Akuntansi

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan

Kebijakan
Akuntansi atas
Pendapatan

tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan -LO adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan Periode waktu.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Kebijakan
Akuntansi atas
Belanja

(3) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Kebijakan Akuntansi atas Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Belanja diakui pada saat timbulnya kewajiban/terjadinya konsumsi aset/terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Kebijakan
Akuntansi atas
Aset

(5) Kebijakan Akuntansi atas Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada

tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
-

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

(6) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek

dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Kebijakan
Akuntansi atas
Ekuitas Dana

(7) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Kebijakan
Akuntansi atas
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih

(8) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Kebijakan
Akuntansi atas
Penyusutan Aset
Tetap

(9) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat



Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi

Pendapatan Negara

dan Hibah Rp.

10.310.405.396,-

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 10.310.405.396,- atau mencapai 116,49 % dari Estimasi Pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 8.850.992.000,- Pendapatan Negara dan Hibah Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah terdiri dari Pendapatan dari Pemanfaatan BMN dan Pendapatan Jasa Kebandarudaraan.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1. Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	-	-	-
2. Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	8.850.992.000	10.310.405.396	116,49
3. Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	8.850.992.000	10.310.405.396	116,49

Berdasarkan Tabel 5 Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2025 mengalami Kenaikan diakibatkan bertambahnya jumlah pengguna jasa dan frekuensi Penerbangan dari dan ke Merauke dibandingkan dengan tahun 2024

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2025 dan Tahun 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
1. Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	-	-	0,00
2. Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	10.310.405.396	9.559.830.930	92,72
3. Pendapatan Lain-lain	-	-	0,00
Jumlah Pendapatan	10.310.405.396	9.559.830.930	92,72

B.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja

Negara Rp.

85.118.005.805,-

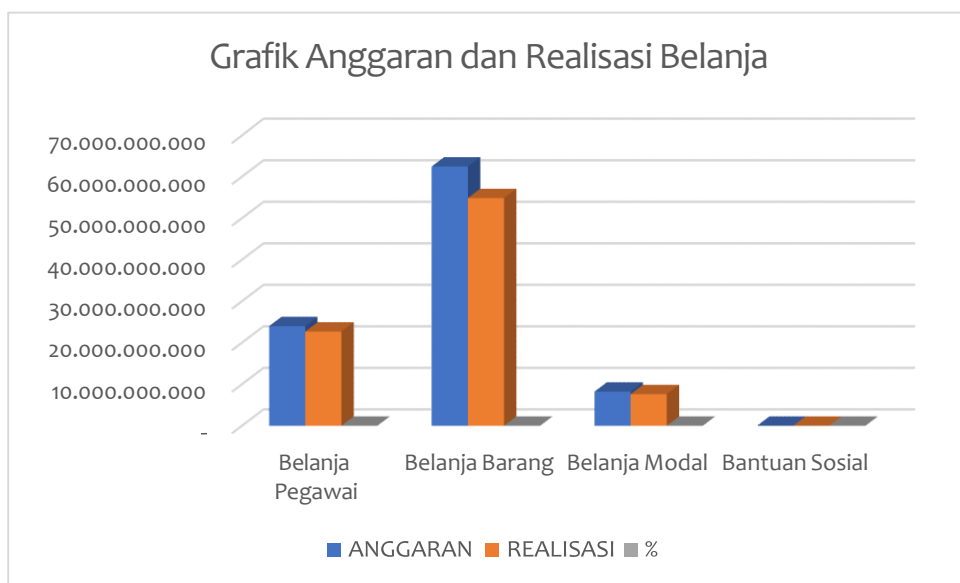
,

Realisasi belanja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 85.118.005.805,- atau 89,94 % dari anggaran Rp. 94.639.102.000,- Rincian Anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2025 tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Negara Per 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	23.979.974.000	22.682.252.850	94,59
Belanja Barang	62.459.128.000	54.841.147.085	87,80
Belanja Modal	8.200.000.000	7.594.605.870	92,62
Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah Belanja	94.639.102.000	85.118.005.805	89,94

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa realisasi belanja Per 31 Desember 2025 mengalami Peningkatan dibandingkan realisasi belanja per 31 Desember 2024

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	22.682.252.850	15.403.287.768	67,91
Belanja Barang	54.841.147.085	60.330.925.500	110,01
Belanja Modal	7.594.605.870	42.047.329.498	554
Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah Belanja	85.118.005.805	117.781.542.766	138,37

Belanja Pegawai Rp.

B.2.1 Belanja Pegawai

22.682.252.850,-

Realisasi Belanja Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah per 31 Desember 2025 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, Belanja Uang Makan, Tunjangan Kinerja Pegawai.

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 22.682.252.850,- atau 94,59 % dari Anggaran Rp. 23.979.974.000,- Berdasarkan Tabel 9, realisasi belanja pegawai Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan dari realisasi belanja pegawai 31 Desember 2024 , Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya Penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada bulan juni 2025 sebanyak 113 Orang.
2. Adanya Kenaikan Pangkat dan kenaikan jabatan fungsional Pegawai

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.558.756.266	7.311.892.297	44,41
Belanja Uang Makan Pegawai	1.687.259.000	1.020.441.000	65,35
Belanja Tunj.Kompensasi Kerja ASN	9.896.633.763	6.816.338.673	45,19
Belanja Lembur	541.224.000	256.273.000	111,19
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	22.683.873.029	15.404.944.970	47,25
Pengembalian Belanja Pegawai	1.620.179	1.657.202	(2,23)
Jumlah Belanja Bersih	22.682.252.850	15.403.287.768	47,26

Belanja Barang Rp.
54.841.147.085,-

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 54.841.147.085,- atau 87,8 % dari Anggaran Rp. 62.459.128.000 ,- Berdasarkan Tabel 10, Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan anggaran belanja.

Tabel 10
Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	3.242.352.184	7.012.933.090	216
Belanja Barang Non Operasional	38.868.434.464	40.792.526.989	104,95
Belanja Jasa	2.607.765.787	3.100.386.929	118,89
Belanja Persediaan	780.757.100	528.929.000	-
Belanja Pemeliharaan	9.086.341.350	7.357.425.750	23,50
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	256.796.200	1.545.371.445	(83,38)
Jumlah Belanja Kotor	54.842.447.085	60.337.573.203	(9,11)
Pengembalian Belanja	1.300.000	6.647.703	-
Jumlah Belanja Bersih	54.841.147.085	60.330.925.500	(9,10)

Belanja Modal Rp.
7.594.605.870,-

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 7.594.605.870,- atau 92,62 % dari anggaran Rp 8.200.000.000,- Berdasarkan Tabel 11, Realisasi

Belanja Modal Per 31 Desember 2025 mengalami Penurunan, dari realisasi belanja modal 31 Desember 2024, Hal ini disebabkan antara lain:

1. Terdapat Perbedaan yang signifikan dari nilai alokasi Pekerjaan Belanja Modal
2. Belanja Modal TA 2025 juga bersumber dari sumber dana RM dan PNB

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.095.606.500	1.748.200.000	134
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.498.999.370	299.800.000	1.067
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	39.999.329.498	(100)
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	7.594.605.870	42.047.329.498	(82)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Bersih	7.594.605.870	42.047.329.498	(82)

Belanja Bantuan
Sosial Rp.NIHIL

B.2.4. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.NIHIL.

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Aset Lancar

Rp. 611.420.942,-

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 611.420.942,- dan Rp. 422.131.986,-

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah per 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12
Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan Tahun 2024

No.	Aset Lancar	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp -	Rp -
2	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp -	Rp -
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	Rp -	Rp -
4	Belanja Dibayar di Muka	Rp -	Rp -
5	Piutang Bukan Pajak	Rp 80.009.912	Rp 160.693.766
6	Bag Lancar Tagihan TP/TGR	Rp -	Rp -
7	Persediaan	Rp 531.411.030	Rp 261.438.220
	Jumlah	Rp 611.420.942	Rp 422.131.986

Kas di Bendahara

Pengeluaran

Rp. 30.000.000,-

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- (Nol) dan Rp.0 (Nol) yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam Tabel 13.

Tabel 13
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Bank Negara Indonesia	-	0
2	Uang Tunai	-	0

Kas di Bendahara
Penerima Rp NIHIL

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah sebesar masing-masing Rp.NIHIL dan Rp. NIHIL,- dikarenakan wajib bayar menyetorkan langsung ke Kas negara berdasarkan kode Billing yang dikeluarkan oleh Bendahara Penerima berdasarkan nota tagihan dari petugas PengelolaPNBP.

Kas Lainnya dan
setara Kas

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Tidak terdapat Saldo Kas Lainnya dan setara Kas Per 31 Desember 2025 dan TA 2024 sehingga masing-masing senilai Rp.0 (Nol) dan Rp. 0 (Nol),-

Belanja dibayar
Dimuka

C.1.4 Belanja Dibayar Dimuka

Tidak terdapat Saldo Belanja dibayar dimuka Per 31 Desember 2025 dan TA 2024 sehingga masing-masing senilai Rp.0 (Nol) dan Rp. 0 (Nol),-

Piutang Bukan
Pajak Rp.
80.009.912,-

C.1.5 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang bukan pajak Per 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing senilai Rp.80.009.912,- dan Rp. 160.693.766,- yang berasal dari piutang negara bukan pajak senilai Rp. 53.245.057,- dan piutang lainnya senilai Rp. 26.764.855,-

Bag Lancar Tagihan
TP/TGR

C.1.6 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Tidak terdapat Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dimuka Per 31 Desember 2025 dan TA 2024 sehingga masing-masing senilai Rp.0 (Nol).

Persediaan

C.1.9 Persediaan

Rp. 531.411.030,-

Nilai Persediaan Per 31 Desember 2025 dan TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 531.411.030,- dan 261.438.220,- Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan tidak untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025 dan TA 2024 tersaji pada Tabel 14.

Tabel 14
Rincian Persediaan

No	Persediaan	31 Desember 2025	TA 2024
1	Barang Konsumsi	360.079.440	66.420.180
2	Barang untuk Pemeliharaan	155.791.590	10.658.040
3	Suku Cadang	15.540.000	184.360.000
5	Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah		531.411.030	261.438.220

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap Rp.
278.984.611.896,-

C.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan TA 2024 tersaji sebesar masing – masing Rp. 278.984.611.896,- dan Rp. 326.687.891.176,- Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah Per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15
Rincian Aset Tetap

No	Jenis	31 Desember 2025	TA 2024
1	Tanah	20.913.289.000	20.912.689.000
2	Peralatan dan Mesin	172.485.436.603	178.561.854.103
3	Gedung dan Bangunan	255.132.137.754	251.633.138.384
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	740.294.154.640	740.294.154.640
5	Aset Tetap Lainnya	-	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
Jumlah		1.188.825.017.997	1.191.401.836.127
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(909.840.406.101)	(864.713.944.951)
Nilai Buku Aset Tetap		278.984.611.896	326.687.891.176

C.2.1. Tanah

Tanah Rp.
20.913.289.000,-

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah Per 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp. 20.913.289.000,- dan Rp.20.912.689.000,- Aset Tanah terdiri dari yang bersertifikat senilai Rp. 20.913.289.000,- Aset berupa Tanah tersebut terletak di Jl. Pemuda, Kelapa Lima; Jln Pemuda, kamundu; Jalan Pelayaran Baru, Maro; Runway 34

Rincian saldo tanah bersertifikat Per 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16
Rincian Saldo Tanah Bersertifikat

No	KIB	Luas (M2)	Nilai	Lokasi	No Dok Kepemili
1	2,01,03,06,002,1	25.641	2.047.787.000	Jl. Pemuda	00046
2	2,01,03,06,002,2	75.897	6.061.438.000	Jl. Pemuda	00036
3	2,01,01,01,002,1	668	2.021.824.000	Jl. Pelayaran Baru	26050105400231
4	2,01,03,06,002,3	135.000	10.781.640.000	Jl. PGT	26050107400028
5	2,01,03,06,002,5	600.000	600.000	Jl. Muli	2605000004143D
Jumlah		837.206	20.913.289.000		

C.2.2. Peralatan dan Mesin

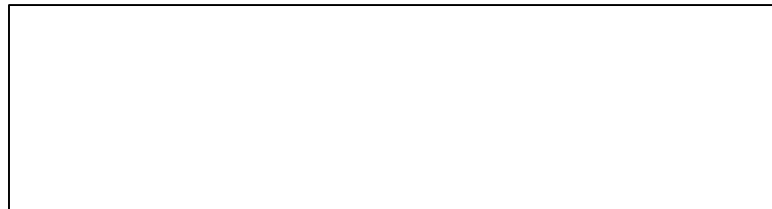
Peralatan dan
Mesin Rp
172.485.436.603,-

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 desember 2025 dan TA 2024 adalah Rp. 172.485.436.603,- dan Rp. 178.561.854.103,- mengalami penurunan karena terdapat peralatan dan mesin yang di Transfer keluar dari satker UPBU Mopah Merauke Ke UPBU Kimaamdan Koreksi Pencatatan Peralatan dan Mesin Berupa penggunaanya karena di serahkan ke Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI)

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	178.561.854.103
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	4.095.606.500
Transfer Masuk	Rp	-
Hibah	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	(10.172.024.000)
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Reklasifikasi BMN-BPYBDS	Rp	-
Saldo per 30 September 2025	Rp	172.485.436.603
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2024	Rp	(165.156.786.126)
Nilai Buku per 30 september 2025	Rp	7.328.650.477

Rincian Aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.



Gedung dan
Bangunan Rp.
255.132.137.754,-

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan Per 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah Rp. 255,132,137,754,- dan Rp. 251.633.138.384,- terjadi kenaikan/Penurunan nilai Aset Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	251.633.138.384
Mutasi tambah:	
Renovasi dan pembangunan	
Koreksi pencatatan nilai Reval	-
Koreksi pencatatan nilai penambahan daya listrik	-
Pembangunan	3.498.999.370
Mutasi kurang:	-
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan	-
Saldo per 30 September 2025	255.132.137.754
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2025	(56.293.368.722)
Nilai Buku per 30 September 2025	198.838.769.032

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 740.294.154.640,-

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 30 Juni 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 740.294.154.640,- dan Rp.740.294.154.640,- Saldo tersebut terdiri dari pembangunan jalan dan jembatan.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	740.294.154.640
Mutasi tambah:	
Pengembangan Informasi Teknologi	-
Pembangunan, JJ dan Pengawasan	-
Mutasi kurang:	
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	-
Saldo per 31 Desember 2025	740.294.154.640
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2025	(688.390.251.253)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	46.819.051.647

Tidak terdapat mutase tambah dan mutase kurang pada saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Konstruksi dalam Pengerjaan Rp. 0,-

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 (nol) - dan Rp.0, (nol)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp. 909.840.406.101)

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing: Rp (909.840.406.101) dan Rp (864.713.994.951) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontrak akun Aset Tetap yang disajikan

berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah .

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel 17, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Tabel 17
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	Rp 20.913.289.000	Rp -	Rp 20.913.289.000
2	Peralatan dan Mesin	Rp 172.485.436.603	Rp 165.156.786.126	Rp 7.328.650.477
3	Gedung dan Bangunan	Rp 255.132.137.754	Rp 56.293.368.722	Rp 198.838.769.032
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 740.294.154.640	Rp 688.390.251.253	Rp 51.903.903.387
5	KDP	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah		Rp 1.188.825.017.997	Rp 909.840.406.101	Rp 278.984.611.896

Kewajiban Jangka
Kewajiban Jangka
Pendek Rp.
4.228.766.057,-

KEWAJIBAN

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2025 tersaji sebesar Rp. 4.228.766.057,- dan Rp.1.790.500.183,-

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah per 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	Jumlah
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	Rp 4.228.766.057
2	Uang Muka dari KPPN	Rp -
3	Utang yang belum ditagihkan	Rp -
4	Pendapatan diterima dimuka	Rp -
Jumlah		Rp 4.228.766.057

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp.
4.228.766.057,-

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2025 dan TA 2024 masing-masing sebesar Rp. 4.228.766.057,- dan Rp. 1.790.500.183

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah per tanggal pelaporan disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uaian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Barang dan Modal yang masih harus dibayar (SPM RPATA)	Rp 4.228.766.057	Belanja Barang dan Modal yang tanggal penyelesaian sampai dengan 31 Desember
2	Utang kepada pihak ketiga lainnya	Rp -	Rp -

Uang Muka dari
KPPN
Rp. 0,-

C.5.2 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN Per 31 Desember 2025 dan TA 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,- (nol) dan Rp.0,- (nol) Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Pendapatan Yang
Ditangguhkan Rp.0
(nol)

C.5.3 Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan yang Ditangguhkan Per 31 Desember 2025 dan Ta 2024 masing- masing sebesar Rp.NIHIL dan Rp.NIHIL

Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan Pendapatan Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan.

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah per tanggal pelaporan disajikan pada Tabel 20.

Tabel 20.
Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan PNB	Rp -
2	PPH yang belum disetor	Rp -
3	PPN yang belum disetor	Rp -
	Total	Rp -

C.5.4 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan
Diterima Dimuka Rp
.0 (nol)

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan TA 2024 sebesar Rp.0 (nol) dan Rp. 0 (nol)

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNB.

Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan pada

Tabel 21.

Tabel 21.
Rincian Pendapatan Diterima di Muka

No	Uraian	31 Desember 2025
1	-	Rp -
2	-	Rp -
3	-	Rp -
	Total	Rp -

Utang Yang belum
ditagihkan Rp. 0
(nol),-

C.5.5 Utang yang belum ditagihkan

Nilai Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2025 dan TA 2024 sebesar Rp. 0,- (nol) dan Rp. 0,- (nol). Utang yang belum ditagihkan kepada pihak ketiga disajikan pada Tabel 21.

Tabel 21.
Rincian Utang yang belum ditagihkan

No	Uraian	31 Desember 2025
1	-	Rp -
2	-	Rp -
3	-	Rp -
Total		Rp -

Ekuitas Rp.
282.572.352.837,-

C.6 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas Per 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 282.572.352.837,- dan Rp. 333.275.064.236,- Rincian Ekuitas disajikan pada Tabel 22.

Tabel 22.
Ekuitas

No	Uraian	31 Desember 2025	Penjelasan
1	Ekuitas	Rp 289.268.600.498	-
2	-	Rp -	
3	-	Rp -	
Total		Rp 289.268.600.498	

D. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN OPERASIONALPendapatan PNBp Rp.
8.952.821.273,-**D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak-LO**

Pendapatan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP)-LO pada Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.952.821.273,- dan Rp. 8.806.458.582,- Pendapatan PNBp-LO merupakan hak pemerintah atas pendapatan PNBp karena adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, tanpa harus memperhatikan adanya aliran kas masuk ke rekening kas negara. Rincian pendapatan PNBp-LO disajikan pada Tabel 23.

Tabel 23
Rincian Pendapatan PNBp-LO TA Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	Tahun 2024	Naik (Turun) %
1. Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	-	55.278.734	-100,00
2, Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	8.898.156.389	8.745.198.314	1,75
3, Pendapatan Lain-lain	-	-	-
4, Pendapatan Penggunaan SARPRAS	54.664.884	-	-
4, Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	-	5.981.534	-100,00
Jumlah	8.952.821.273	8.806.458.582	1,66

Pendapatan jasa merupakan pendapatan PNBp-LO yang diperoleh dari pendapatan jasa kebandarudaraan.

Beban Pegawai Rp.
22.682.252.850,-**D.2. Beban Pegawai**

Beban pegawai Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing- masing sebesar Rp. 22.682.252.850,- dan Rp. 15.403.287.758,-

Beban pegawai adalah beban atas kewajiban kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian beban pegawai disajikan pada Tabel 24.

Tabel 24
Rincian Beban Pegawai Per 30 September 2025 dan 30 September 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Gaji	10.557.136.087	7.310.235.095	44,42
Beban Tunjangan	9.896.633.763	6.816.338.673	45,19
Beban Honorarium	-	-	-
Beban Uang Makan	1.687.259.000	1.020.441.000	65,35
Beban Lembur	541.224.000	256.273.000	111,19
Jumlah	22.682.252.850	15.403.287.768	47,26

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing Rp.1.112.082.040,- dan Rp. 1.081.802.686,-

Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian beban persediaan disajikan pada Tabel 25.

Tabel 25
Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.112.082.040	1.081.802.686	2,80
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	1.112.082.040	1.081.802.686	2,80

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa Per 31 Desember 2025 dan 31 September 2024 masing-masing sebesar Rp. 44.717.252.435,- dan Rp. 51.663.090.784,-

Beban jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian beban jasa disajikan dalam Tabel 26.

Tabel 26
Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	2.046.309.144	3.790.137.149	(46,01)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	49.950.000	206.193.250	(75,78)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	313.290.000	321.721.000	(2,62)
Pengembalian Beban Honor Operasional Satker	-	(6.018.000)	(100,00)
Beban Barang Operasional Lainnya	831.503.040	2.760.452.691	(69,88)
Beban Pengiriman surat Dinas Pos Pusat	-	30.000.000	(100,00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	38.302.369.464	41.109.135.865	(6,83)
Beban Barang Non Operasional Penanganan	-	-	-
Pandemi Covid-19	-	-	-
Belanja Bahan	556.065.000	351.081.900	58,39
Beban Langganan Listrik	2.373.563.673	2.515.919.633	(5,66)
Beban langganan Telepon	58.050.594	-	100,00
Beban Langganan Air	30.000.000	30.000.000	-
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	146.151.520	254.817.296	(42,64)
Beban Aset Ekstrakomtabel peralatan dan mesin	-	-	-
Beban Jasa Konsultan	-	299.650.000	(100,00)
Beban Honor Outpu Kegiatan	10.000.000	-	100,00
Jumlah	44.717.252.435	51.663.090.784	(13,44)

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 8.485.043.600,- dan Rp. 6.548.521.730,-

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan asset tetap atau asset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan disajikan dalam Tabel 27.

Tabel 27
Rincian Beban Pemeliharaan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	3.250.344.700	2.189.993.300	48,42
Beban Pemeliharaan Peralatan & Mesin	1.645.218.200	2.124.307.350	(22,55)
Beban Pemeliharaan Peralatan & Mesin lainnya	1.009.412.250	637.000.000	
Beban Pemeliharaan Irigasi	216.899.900	-	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	-	-	-
Beban persediaan Pemeliharaan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1.983.614.800	1.567.131.600	27
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	210.733.750	14.549.480	1.348,39
Beban Persediaan suku cadang	168.820.000	15.540.000	986,36
Jumlah	8.485.043.600	6.548.521.730	29,57

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas

Rp 256.769.200,-

Beban perjalanan dinas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 256.796.200,- dan 1.544.741.742,-

Beban perjalanan dinas tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian beban perjalanan dinas disajikan dalam Tabel 28.

Tabel 28
Rincian Beban Perjalanan Dinas

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	256.769.200	1.488.609.695	(82,75)
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	-	(629.703)	
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	56.761.750	(100)
Jumlah	256.769.200	1.544.741.742	(83,38)

Beban Barang untuk
diserahkan kepada
Masyarakat Rp.0,- (nol)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat Per 30 September 2025 dan 30 September 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 (nol) dan Rp.0 (nol)

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat.

Rincian Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat sebagaimana tersaji pada Tabel 29.

Tabel 29

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Gedung & Bangunan diserahkan kepada masyarakat/pemda	-	-	-
Beban Peralatan & Mesin diserahkan kepada masyarakat/pemda	-	-	-
Beban Barang Lainnya kepada masyarakat/pemda	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Bantuan Sosial
Rp.0,- (nol)

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.NIHIL dan Rp.NIHIL

Rincian beban bantuan sosial tersaji dalam Tabel 30.

Tabel 30

Rincian Beban Bantuan Sosial

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Bansos untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bansos untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bansos untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan
Amortisasi Rp
57.297.365.150,-

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 57.297.365.150,- dan Rp. 84.605.893.347,-

Beban penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu

asset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat asset tersebut. Sedangkan beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk asset tak berwujud. Rincian beban penyusutan dan amortisasi tersaji pada Tabel 31.

Tabel 31
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan & Mesin	3.075.115.812	6.151.665.595	(50,01)
Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	6.510.313.755	6.470.914.935	0,61
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	45.062.712.543	70.190.120.002	(35,80)
Beban Penyusutan Irigasi	155.163.756	286.490.197	(45,84)
Beban Penyusutan Jaringan	495.179.284	499.929.284	(0,95)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	1.998.880.000	1.006.773.334	99
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud			-
Jumlah	57.297.365.150	84.605.893.347	(44,67)

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih Rp
4.967.804,-

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban penyisihan piutang tak tertagih Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.967.804,- dan Rp. 113.488.975,-

Beban penyisihan piutang tak tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktagihan piutang dalam satu periode tahun anggaran berjalan.

Rincian beban penyisihan piutang tak tertagih tersaji pada Tabel 32.

Tabel 32
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang PNPB	4.967.804	112.681.995	(96)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya	-	806.980	(100)
Jumlah	4.967.804	113.488.975	(96)

Beban Lain-lain
Rp.NIHIL

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.NIHIL dan Rp.NIHIL

Beban lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja.

Rincian beban lain-lain disajikan pada Tabel 33.

Tabel 33

Rincian Beban Lain-lain

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan & Mesin	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung & Bangunan	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Operasional
Rp.(125.602.938.806)

D.12. Kegiatan Operasional

Pos Surplus/deficit dari kegiatan operasional Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.(125.602.938.806) dan Rp.(152.154.368.450),- terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Rincian surplus/deficit dari kegiatan non operasional disajikan pada Tabel 34.

Tabel 34

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan dari kegiatan operasional	8.952.821.273	8.806.458.582	1,66
Beban dari kegiatan Operasional	134.555.760.079	160.960.827.032	(16,40)
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	-	-	-
Penjualan Alat kantor	-	-	-
Jumlah Beban	134.555.760.079	160.960.827.032	(16)
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	(125.602.938.806)	(152.154.368.450)	(17,450)

Pos Surplus/deficit dari kegiatan non operasional Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 7.560.198,- dan Rp. 471.198.542,- terdiri dari pendapatan Pelepasan aset non lancar dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Rincian surplus/deficit dari kegiatan non operasional disajikan pada Tabel 34.

Tabel 34

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	7.560.198	471.198.542	(98,40)
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	-	-	-
Penjualan Alat kantor	-	-	-
Defisit selisih kurs	-	-	-
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional	7.560.198	471.198.542	(98,4)

Surplus/Defisit –LO
Rp.(125.595.378.608)

D.15. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing terdiri dari Rp.(125.595.378.608) dan (151.683.169.908). Rincian per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel 35.

Tabel 35
Rincian Surplus/Defisit -LO

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Surplus Defisit sebelum Pos Luar Biasa	(125.595.378.608)	(151.683.169.908)	(17)
	-	-	-
			-
Jumlah	(125.595.378.608)	(151.683.169.908)	(17)

Surplus/Defisit Sebelum
Pos Luar Biasa Rp
(NIHIL)

D.14. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos luar biasa per Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing terdiri dari Rp (NIHIL) dan (nihil) Rincian per Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel 35.

Tabel 35
Rincian Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Surplus Defisit sebelum Pos Luar Biasa			-
	-	-	-
			-
Jumlah	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp.
333.275.064.236,-*

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal Per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 333.275.064.236,- dan 31 Desember 2024 Rp. 376.899.940.852,-

*Surplus/Defisit - LO
Rp.(125.595.378.608),-*

E.2. Surplus (Defisit) – LO

Defisit-LO untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp.(125.595.978.608),- dan 31 Desember 2024 Rp. (151.683.169.908),-

Defisit-LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/deficit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

*Koreksi yang
Menambah/Mengurangi
Ekuitas
Rp. 85.066.800,-*

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari Dampak Kumulatif perubahan kebijakan Akuntansi/Kesalahan mendasar.

Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas Per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 85.066.800,- dan 31 Desember 2024 Rp. (163.418.544,-)

*Selisih Revaluasi Aset
Tetap Rp.0,- (nol)*

E.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- (nol).

*Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp. 600.000,-*

E.5. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset tetap pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan asset Non Revaluasi Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 600.000,- dan Rp. 155.622.000,-

*Koreksi atas Beban
Rp.0,- (nol)*

E.6. Koreksi atas Beban

Koreksi atas beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan.

Koreksi atas beban Per Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp.0,- (nol).

Rincian koreksi atas beban disajikan dalam Tabel 37.

Tabel 37
Koreksi atas Beban

No	Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Beban Pegawai	-	-
2	Beban Persediaan	-	-
		-	-
Jumlah		-	-

E.7. Koreksi atas Pendapatan

Koreksi atas pendapatan
Rp.NIHIL

Koreksi atas pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan.

Koreksi atas pendapatan Per Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp.NIHIL.

Rincian koreksi atas pendapatan disajikan dalam Tabel 38.

Tabel 38
Koreksi atas pendapatan

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Pendapatan PNPB	-	-
2	Pendapatan Perpajakan	-	-
Jumlah		-	-

E.8. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.NIHIL

Penyesuaian Nilai Aset Per Per Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.NIHIL.

E.9. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi
Rp. NIHIL

Koreksi Atas Reklasifikasi Per 31 Desember 2025 sebesar Rp. NIHIL dan 31 Desember 2024 Rp. NIHIL

E.10. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp. 42.155.720.311,-

Nilai Transaksi Antar Entitas Per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 74.807.600.409,- dan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 108.221.711.836,-

Kenaikan/Penurunan
Ekuitas Rp.
(50.702.711.399)

E.11. Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Nilai Kenaikan/Penurunan Ekuitas Per 30 September 2025 sebesar Rp. (50.702.711.399),- dan 31 Desember 2024 Rp. (43.624.876.616,-)

Ekuitas Akhir Rp.
282.572.352.837,-

E.12. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas akhir Per 30 September 2025 sebesar Rp. 282.572.352.837,- dan 30 September 2024 Rp. 333.275.064.236,-

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Sampai dengan tanggal pelaporan per 31 Desember 2025 realisasi belanja kantor UPBU Mopah Rp. 85.118.005.805,- atau 89,94 % dari Pagu Belanja Rp. 94.639.102.000,-

D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting lainnya setelah tanggal neraca.

D.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT BPK

-

D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana dalam lampiran.

D.4 REKENING PEMERINTAH

Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Kantor UPBU Mopah adalah rekening virtual pada Bank BNI dengan nomor rekening 9891212885921000 a.n. BPG 068 Bandar Udara Mopah

D.5 Pengungkapan Lainnya

-

D.6 PENGUNGKAPAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemuktahiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 pada Kementerian Perhubungan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Pelaksanaannya diantaranya melalui 1 (satu) Program Prioritas, 1 (satu) Kegiatan Prioritas di Satuan Kerja Kantor UPBU Mopah dengan Pagu Mencapai Rp 118.000.000,- (Seratus delapan belas juta rupiah) dan Realisasi sebesar Rp. 99.766.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Program Prioritas Nasional

Nama Satker	Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Ralisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis
Kantor UPBU Mopah	Operasional dan Pemeliharaan Sarana Bandar Udara	Rp. 118.000.000	Rp. 99.766.000	84.55 %	Paket	100%	100%

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA
SATUAN KERJA : (288592) KANTOR UPBU MOPAH

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 1:54 PM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	58,212,861	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	26,899,352	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNPB	0	4,967,804
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	134,497
0.0	117111	Barang Konsumsi	360,079,440	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	155,791,590	0
0.0	117114	Suku Cadang	15,540,000	0
0.0	131111	Tanah	20,913,289,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	174,410,236,603	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	255,132,137,754	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	717,267,363,912	0
0.0	134112	Irigasi	3,139,034,000	0
0.0	134113	Jaringan	19,887,756,728	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	167,081,586,126
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	56,293,368,722
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	679,834,478,100
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	2,736,577,783
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	5,819,195,370
0.0	162151	Software	18,735,338	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	4,228,766,057	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	5,505,693,000	0
0.0	166114	BMN Dalam Proses PMPP	36,137,150,000	0
0.0	169121	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0	33,160,830,001
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	5,505,693,000
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	18,735,338
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	4,228,766,057
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	85,118,005,805
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	10,310,405,396	0
0.0	391111	Ekuitas	0	333,275,064,236
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	600,000
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	84,466,800
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	54,664,884
3.0	425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0	8,898,156,389
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7,560,198
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	5,770,471,920	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	100,447	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	351,839,590	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA
SATUAN KERJA : (288592) KANTOR UPBU MOPAH

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 1:54 PM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	124,682,830	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	45,360,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	135,530,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	30,486,564	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	374,545,470	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,127,971,000	0
3.0	511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	179,375,000	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	633,545,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	262,630,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	1,984,886,700	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	45,030	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	65,139,530	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	20,255,016	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	122,072,990	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	559,288,000	0
3.0	511631	Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	77,875,000	0
3.0	511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	241,600,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	136,695,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	384,022,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	157,202,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	7,463,118,858	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2,433,514,905	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	2,046,309,144	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	49,950,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	313,290,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	831,503,040	0
3.0	521211	Beban Bahan	556,065,000	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	10,000,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	38,302,369,464	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	2,373,563,673	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	58,050,594	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	30,000,000	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	146,151,520	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,250,344,700	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,645,218,200	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,009,412,250	0
3.0	523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1,983,614,800	0
3.0	523132	Beban Pemeliharaan Irigasi	216,899,900	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA
SATUAN KERJA : (288592) KANTOR UPBU MOPAH

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 1:54 PM
Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	256,796,200	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3,075,115,812	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6,510,313,755	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	45,062,712,543	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	155,163,756	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	495,179,284	0
3.0	592221	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	1,998,880,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,112,082,040	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	210,733,750	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	168,820,000	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	4,967,804	0
JUMLAH			1,382,122,851,110	1,382,122,851,110

Keterangan :
FINAL

MERAUKE, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGUNA ANGGARAN
BLOSIUS BASA
NIP. 197401022000031001



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA

SATUAN KERJA : (288592) KANTOR UPBU MOPAH

Tgl Data : 05/05/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 1:54 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	85,118,005,805
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	10,310,405,396	0
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	54,664,884
3.0	425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0	8,923,842,499
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7,560,198
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,324,337,815
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	5,770,471,920	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	100,626	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	351,839,590	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	124,682,830	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	45,360,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	137,150,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	30,486,564	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	374,545,470	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,127,971,000	0
3.0	511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	179,375,000	0
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	633,545,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	262,630,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,984,886,700	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	45,030	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	65,139,530	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	20,255,016	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	122,072,990	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	559,288,000	0
3.0	511631	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	77,875,000	0
3.0	511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	241,600,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	136,695,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	384,022,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	157,202,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	7,463,118,858	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2,433,514,905	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,047,609,144	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	49,950,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	313,290,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	831,503,040	0
3.0	521211	Belanja Bahan	556,065,000	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	10,000,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA

SATUAN KERJA : (288592) KANTOR UPBU MOPAH

Tgl Data : 05/05/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 1:54 PM

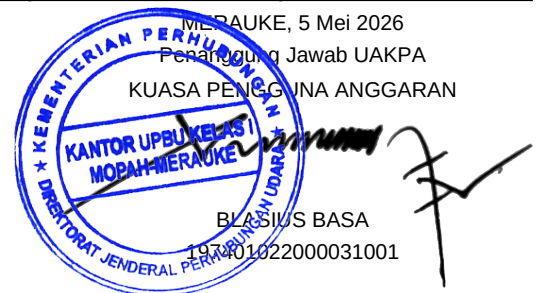
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	38,302,369,464	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	780,757,100	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	2,373,563,673	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	58,050,594	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	30,000,000	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	146,151,520	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,250,344,700	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,645,218,200	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	980,851,500	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,009,412,250	0
3.0	523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1,983,614,800	0
3.0	523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	216,899,900	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	256,796,200	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,095,606,500	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,498,999,370	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	179
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	1,620,000
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	1,300,000
JUMLAH			95,431,331,380	95,431,331,380

Keterangan :

FINAL



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA
SATUAN KERJA : (288592) KANTOR UPBU MOPAH

Tgl Data : 05/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 1:54 PM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	85,118,005,805
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	10,310,405,396	0
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	54,664,884
3.0	425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0	8,923,842,499
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7,560,198
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,324,337,815
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	5,770,471,920	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	100,626	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	351,839,590	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	124,682,830	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	45,360,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	137,150,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	30,486,564	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	374,545,470	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,127,971,000	0
3.0	511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	179,375,000	0
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	633,545,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	262,630,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,984,886,700	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	45,030	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	65,139,530	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	20,255,016	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	122,072,990	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	559,288,000	0
3.0	511631	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	77,875,000	0
3.0	511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	241,600,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	136,695,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	384,022,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	157,202,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	7,463,118,858	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2,433,514,905	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,047,609,144	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	49,950,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	313,290,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	831,503,040	0
3.0	521211	Belanja Bahan	556,065,000	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	10,000,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA
SATUAN KERJA : (288592) KANTOR UPBU MOPAH

Tgl Data : 05/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 1:54 PM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	38,302,369,464	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	780,757,100	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	2,373,563,673	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	58,050,594	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	30,000,000	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	146,151,520	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,250,344,700	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,645,218,200	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	980,851,500	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,009,412,250	0
3.0	523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1,983,614,800	0
3.0	523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	216,899,900	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	256,796,200	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,095,606,500	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,498,999,370	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	179
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	1,620,000
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	1,300,000
JUMLAH			95,431,331,380	95,431,331,380

Keterangan :
FINAL

MERAUKE, 5 Mei 2026
Peranggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BLASIUS BASA
197801022000031001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA
SATUAN KERJA : (288592) KANTOR UPBU MOPAH

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 1:55 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	8,952,821,273	8,806,458,582	146,362,691	1.662
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	8,952,821,273	8,806,458,582	146,362,691	1.662
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	8,952,821,273	8,806,458,582	146,362,691	1.662
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	22,682,252,850	15,403,287,768	7,278,965,082	47.256
Beban Persediaan	1,112,082,040	1,081,802,686	30,279,354	2.799
Beban Barang dan Jasa	44,717,252,435	51,663,090,784	(6,945,838,349)	(13.444)
Beban Pemeliharaan	8,485,043,600	6,548,521,730	1,936,521,870	29.572
Beban Perjalanan Dinas	256,796,200	1,544,741,742	(1,287,945,542)	(83.376)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA
SATUAN KERJA : (288592) KANTOR UPBU MOPAH

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 1:55 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	57,297,365,150	84,605,893,347	(27,308,528,197)	(32.277)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	4,967,804	113,488,975	(108,521,171)	(95.623)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	134,555,760,079	160,960,827,032	(26,405,066,953)	(16.405)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(125,602,938,806)	(152,154,368,450)	26,551,429,644	(17.45)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7,560,198	471,198,542	(463,638,344)	(98.396)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7,560,198	471,198,542	(463,638,344)	(98.396)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7,560,198	471,198,542	(463,638,344)	(98.396)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(125,595,378,608)	(151,683,169,908)	26,087,791,300	(17.199)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(125,595,378,608)	(151,683,169,908)	26,087,791,300	(17.199)

Keterangan :
FINAL

MERAUKE, 5 Mei 2026
Peranggo ng Jawab UAKPA
KUASA PENGUNA ANGGARAN



BLASILUS BASA
NIP. 195401022000031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA
SATUAN KERJA : (288592) KANTOR UPBU MOPAH

Tgl Data : 05/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 1:56 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	333,275,064,236	376,899,940,852	(43,624,876,616)	(11.57)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(125,595,378,608)	(151,683,169,908)	26,087,791,300	(17.2)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	85,066,800	(163,418,544)	248,485,344	(152.05)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	600,000	155,622,000	(155,022,000)	(99.61)
LAIN-LAIN	84,466,800	(319,040,544)	403,507,344	(126.48)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	74,807,600,409	108,221,711,836	(33,414,111,427)	(30.88)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(50,702,711,399)	(43,624,876,616)	(7,077,834,783)	16.22
EKUITAS AKHIR	282,572,352,837	333,275,064,236	(50,702,711,399)	(15.21)

Keterangan :
FINAL

MERAUKE, 5 Mei 2026
Peranggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



BLASIS BASA
NIP 197401022000031001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 05
SATUAN KERJA : KANTOR UPBU MOPAH 288592

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 1:56 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	8,850,992,000	10,310,405,396	1,459,413,396	116	9,756,001,000	9,559,830,930	196,170,070	98
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	8,850,992,000	10,310,405,396	1,459,413,396	116	9,756,001,000	9,559,830,930	196,170,070	98
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	8,850,992,000	10,310,405,396	1,459,413,396	116	9,756,001,000	9,559,830,930	196,170,070	98
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	94,639,102,000	85,118,005,805	(9,521,096,195)	90	120,948,174,000	117,781,542,766	3,166,631,234	97
1. Belanja Pegawai	23,979,974,000	22,682,252,850	(1,297,721,150)	95	15,416,330,000	15,403,287,768	13,042,232	100
2. Belanja Barang	62,459,128,000	54,841,147,085	(7,617,980,915)	88	63,482,919,000	60,330,925,500	3,151,993,500	95
3. Belanja Modal	8,200,000,000	7,594,605,870	(605,394,130)	93	42,048,925,000	42,047,329,498	1,595,502	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 05
SATUAN KERJA : KANTOR UPBU MOPAH 288592

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 1:56 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	94,639,102,000	85,118,005,805	(9,521,096,195)	90	120,948,174,000	117,781,542,766	3,166,631,234	97
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

MERAUKE, 5 Mei 2026

Penganggung Jawab UAKPA
KILASATUNGUNA ANGGARAN



BLASIS BASA
NIP 197403022000031001